



Indonesia
Research
Institute for
Decarbonization

Peran Kelompok Masyarakat Sipil Sulawesi Tengah dalam Menyelaraskan Aksi Iklim Daerah dengan Target Iklim Indonesia



Penulis:

Anindya Novianti Putri

Reviewer (sesuai urutan abjad):

Julia Theresya, Henriette Imelda, Maria Putri Adianti

Kontributor:

Riskawati

Layout:

Ratna Ayu L

Desember 2024

Publikasi ini bisa diunduh melalui:

<https://irid.or.id/publication/>

Disusun berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), dan Yayasan PIKUL pada tanggal 11 Desember 2024.

Materi-materi yang disampaikan telah mendapat *consent* dari sumber terkait.

Semua gambar yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari iStock.

Dikutip sebagai: Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2024). Discussion Paper: Peran Kelompok Masyarakat Sipil Sulawesi Tengah dalam Menyelaraskan Aksi Iklim Daerah dengan Target Iklim Indonesia. Indonesia Research Institute for Decarbonization

Daftar Isi

Daftar Isi	03
Daftar Singkatan	04
01 <u>Pendahuluan</u>	06
02 <u>Dilema Isu Iklim dan Industri di Sulawesi Tengah</u>	08
2.1 <u>Perubahan Iklim dan Dampaknya pada Mata Pencaharian Masyarakat</u>	09
2.2 <u>Industrialisasi dan Dampaknya</u>	11
03 <u>Peran dan Inisiatif Komunitas dalam Menjawab Krisis Iklim dan Lingkungan di Sulawesi Tengah</u>	16
04 <u>Hasil Diskusi</u>	22

Daftar Singkatan

AEER	: Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat
AHA	: <i>Anticipatory Humanitarian Action</i>
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AP2SI	: Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia
BBTNLL	: Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu
BKBM	: Balai Kegiatan Belajar Masyarakat
BKK	: Bantuan Keuangan Khusus
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
FPIC	: <i>Free, Prior, and Informed Consent</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
IRID	: Indonesia Research Institute for Decarbonization
JATAM	: Jaringan Advokasi Tambang
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPA	: Konsorsium Pembangunan Agraria
KPPA	: Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak
LPHD	: Lembaga Pengelola Hutan Desa

LPKD	: Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
Perdes	: Peraturan Desa
Perpres	: Peraturan Presiden
Pokja	: Kelompok Kerja
Proklam	: Program Kampung Iklim
PSN	: Proyek Strategis Nasional
ROA	: Relawan untuk Orang dan Alam
SP	: Solidaritas Perempuan
TNLL	: Taman Nasional Lore Lindu
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
YPAL	: Yayasan Panorama Alam Lestari
YPL	: Yayasan Pemerhati Lingkungan
YTM	: Yayasan Tanah Merdeka

01. Pendahuluan

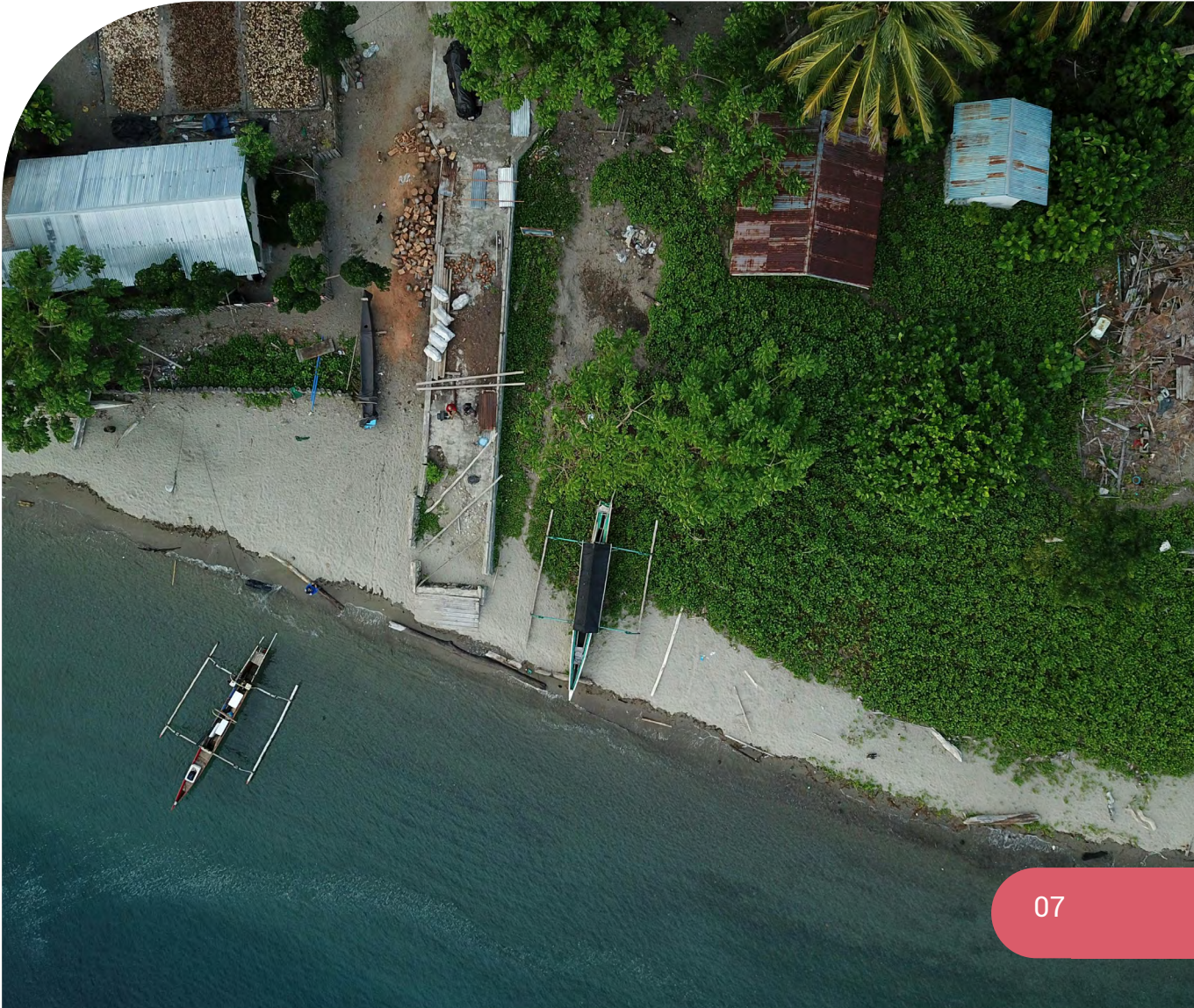


Pada tahun 2021, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Perpres ini menindaklanjuti komitmen Indonesia terkait implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang mencakup peran daerah untuk melakukan implementasi aksi iklim di Indonesia dalam mencapai target emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia. Bukan hanya pengurangan emisi GRK yang harus dilakukan oleh daerah, tapi juga peningkatan ketangguhan daerah terhadap dampak perubahan iklim yang menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melakukan identifikasi yang komprehensif akan membantu provinsi dalam melakukan intervensi yang tepat dalam pembangunan daerah.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dengan pertambangan dan pembangunan kawasan industri yang kian bertumbuh dan pada saat yang bersamaan, berkontribusi terhadap peningkatan emisi GRK. Hal ini menunjukkan bahwa peran daerah seharusnya tidak hanya terfokus pada pemerintah daerahnya saja, namun juga peran dari aktor-aktor lain, seperti entitas non-pemerintah daerah yang mencakup kelompok masyarakat sipil, juga memiliki peran penting. Itu sebabnya, pada tanggal 7 Oktober 2024, Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), serta Yayasan Pikul, mengadakan diskusi bersama dengan kelompok masyarakat sipil untuk melakukan pemetaan permasalahan implementasi aksi iklim di Sulawesi Tengah. Diskusi awal ini menghasilkan tiga isu utama di Sulawesi Tengah yang perlu disorot, yaitu dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan transisi energi.

Menindaklanjuti pembahasan tersebut, pada tanggal 11 dan 12 Desember 2024, IRID, WALHI Sulawesi Tengah, AEER, dan Yayasan Pikul mengadakan dua sesi diskusi yang bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi ketiga isu utama di atas, baik dengan kelompok masyarakat sipil saja, serta dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah.

Discussion paper ini mencakup hasil diskusi yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2024 yang khusus dilakukan bagi **entitas non-pemerintah daerah yang terdiri dari komunitas dan masyarakat lokal**. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam fokus tiga isu utama di Sulawesi Tengah yang telah dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2024. Selain itu, diskusi ini juga bertujuan untuk melakukan pemetaan peran masing-masing entitas non-pemerintah daerah terkait tiga isu tersebut, termasuk di dalamnya melakukan identifikasi hambatan dan peluang yang dihadapi oleh entitas-entitas tersebut di tingkat daerah.



02. Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Industri di Sulawesi Tengah

Diskusi yang dilakukan pada tanggal [7 Oktober 2024](#) telah menghasilkan tiga isu utama yang menjadi sorotan di Sulawesi Tengah. Pertama, **dampak perubahan iklim yang memengaruhi mata pencaharian masyarakat yang bergantung terhadap hasil pertanian dan perkebunan, seperti kopi dan kakao.** Kedua, **degradasi lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan** juga menjadi permasalahan yang masih marak terjadi, diperparah dengan masifnya **pembukaan lahan untuk keperluan pembangunan kawasan industri.** Degradasi lahan tidak hanya terjadi di daratan, namun juga di wilayah pesisir yang dapat mengancam keanekaragaman hayati dan berdampak juga terhadap mata pencaharian masyarakat lokal. Ketiga, **masifnya pembangunan kawasan industri dan segala aktivitas di dalamnya, termasuk transisi energi.** Pembangunan industri untuk mendukung hilirisasi nikel oleh pemerintah ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyejahterakan masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya, aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap mata pencaharian masyarakat hingga ekosistem di sekitar. Diskusi di tanggal 11 Desember 2024 dilakukan untuk memperdalam ketiga isu yang telah disorot sebelumnya, dengan mengundang kelompok masyarakat sipil sebagai peserta. Diskusi ini juga mencakup peran masing-masing dalam rangka implementasi aksi iklim yang dilakukan di daerah, merespons industrialisasi, serta transisi energi di Sulawesi Tengah.

2.1. Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Mata Pencaharian Masyarakat

Sulawesi Tengah memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, utamanya menyangkut komoditas pertanian dan perkebunan seperti kopi dan cokelat yang pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Di Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, perubahan pola cuaca telah menyebabkan gagal panen bagi petani jagung dan padi. Selain ancaman gagal panen akibat iklim, Kecamatan Lore Tengah juga mengalami persoalan keterbatasan lahan produktif akibat sebagian besar tekstur tanah mengandung air rawa yang kurang cocok untuk tanaman pertanian. Keterbatasan lahan untuk pertanian ini mengharuskan adanya pertimbangan alternatif komoditas tanaman bernilai ekonomi tinggi yang lebih adaptif terhadap karakteristik lahan tersebut, seperti kakao dan durian. Ancaman gagal panen dan keterbatasan lahan yang dialami masyarakat Kecamatan Lore Tengah juga semakin diperparah dengan keberadaan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) membatasi ruang gerak masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan hasil hutan. Lahan milik masyarakat sering kali tumpang tindih dengan lahan milik taman nasional tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa **tata kelola terkait lahan di Kecamatan Lore Tengah masih kurang optimal.** Masyarakat juga dihadapkan pada prosedur administratif yang ketat ketika hendak memanfaatkan hasil hutan, seperti kayu, di mana mereka diharuskan untuk melapor terlebih dahulu ke Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa (LPKD) atau lembaga lainnya di bawah Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL). Akibatnya, aktivitas masyarakat dalam mencari komoditas untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk komoditas kayu yang biasanya digunakan sebagai sumber energi masyarakat setempat menjadi semakin terbatas.



Selain memengaruhi mata pencaharian masyarakat di wilayah daratan, **ketidakpastian kondisi iklim yang berdampak pada perubahan kondisi cuaca juga berdampak signifikan terhadap aktivitas nelayan di wilayah pesisir.** Wilayah pesisir dan laut sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti gelombang pasang dan kenaikan permukaan air laut yang dapat mengakibatkan banjir rob. Selain itu, perubahan kondisi cuaca yang memengaruhi tinggi ombak laut juga berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Hal ini akhirnya berdampak pada fluktuasi harga ikan: jika cuaca dan ombak dalam kondisi baik, harga ikan cenderung stabil dan relatif murah; sebaliknya, jika ombak tinggi dan nelayan tidak dapat melaut, maka pasokan ikan berkurang dan harga ikan juga ikut meningkat. **Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian penghasilan bagi nelayan, yang terpaksa mengurangi frekuensi melaut pada saat cuaca buruk.** Akibatnya, pendapatan harian mereka juga menjadi tidak menentu. Sementara itu, dampak kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim juga mengancam wilayah permukiman, seperti yang terjadi di Desa Tosale, Kabupaten Donggala, di mana permukaan air laut yang semakin tinggi menyebabkan sebagian wilayah desa tergenang dan berisiko tenggelam.



2.2. Industrialisasi dan Dampaknya

Perubahan iklim bukanlah satu-satunya tantangan yang dihadapi oleh Sulawesi Tengah. Maraknya pembukaan tambang dan pembangunan industri, terutama untuk mendukung proyek nasional seperti hilirisasi nikel, juga memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Meskipun hilirisasi nikel dianggap sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung upaya transisi energi, misalnya melalui produksi katoda¹ baterai untuk kendaraan listrik. Walau demikian, aspek keberlanjutan dari hilirisasi nikel tersebut perlu ditelaah secara mendalam, termasuk terkait tata kelola industri di tingkat daerah.

Eksansi industri nikel dan pertambangan di Sulawesi Tengah telah berkontribusi besar terhadap deforestasi. Adanya deforestasi yang menyebabkan degradasi lingkungan menyebabkan banyaknya masyarakat yang terdampak, akibat kebijakan negara yang memberikan kelonggaran terhadap aktivitas ekspansi dan eksploitasi hutan. **Deforestasi dan perampasan lahan yang terjadi di Sulawesi Tengah tidak hanya ditujukan untuk keperluan pembukaan tambang dan industri, tetapi juga untuk sektor pertanian skala besar, seperti yang terjadi di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Toli-Toli.** Izin konsesi untuk keperluan pertambangan dan pertanian sering kali diterbitkan tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses perumusan sejak awal. Akibat kurangnya pelibatan masyarakat setempat, degradasi lingkungan akibat aktivitas-aktivitas pertambangan dan industri tersebut, kemudian berdampak terhadap sumber mata pencaharian masyarakat setempat, khususnya bagi mereka yang bergantung terhadap hasil hutan. Tidak hanya itu, keberadaan makhluk hidup di dalamnya, termasuk satwa seperti anoa dan rusa, juga menghadapi ancaman kehilangan habitat akibat deforestasi.



¹ Katoda merupakan salah satu komponen penting dalam baterai. Dalam pengisian daya, katoda menjadi tempat terjadinya reduksi (perolehan elektron) sebelum elektron mengalir ke anoda untuk terjadinya oksidasi (pelepasan elektron).

Di Kabupaten Sigi, terdapat dua izin pertambangan baru yang telah diterbitkan yang akan menggunakan lahan seluas 150 hektar. Sementara itu, di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebanyak 33 izin pertambangan batu gamping diterbitkan di tahun 2023. Kelonggaran penerbitan izin yang masif ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat setempat, terutama karena batu gamping sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pengolahan nikel di kawasan industri di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Kegiatan deforestasi yang dilakukan untuk keperluan kegiatan industri ini juga tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga berdampak pada keberlangsungan wilayah perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat lokal. Aktivitas sehari-hari masyarakat yang bergantung pada alam juga akan dipengaruhi oleh kegiatan industri yang merusak lingkungan, seperti tercemarnya sumber mata air yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Morowali Utara.

Upaya mengatasi pencemaran sumber mata air sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui distribusi air bersih. Namun, cakupan distribusi yang belum merata dengan kualitas air yang kurang memadai, menjadi persoalan yang menambah beban masyarakat. Selain menyebabkan pencemaran terhadap air bersih, dampak dari kegiatan industri juga meluas ke wilayah pesisir, seperti efek pembuangan limbah dari kapal tongkang yang mencemari laut. Salah satu contoh nyata terjadi di Desa Ganda-Ganda, Kabupaten Morowali Utara, di mana pencemaran air laut menyebabkan nelayan kesulitan untuk mencari ikan. Pencemaran serupa juga terjadi di Sungai Lariang akibat pengerukan tambang pasir untuk memasok kebutuhan pembangunan industri, yang berdampak langsung kepada nelayan kerang sungai (kerang meti). Hilangnya mata pencaharian utama ini kemudian menyebabkan sebagian besar nelayan meti beralih profesi, salah satunya menjadi pengepul besi rongsokan di perusahaan-perusahaan industri setempat.

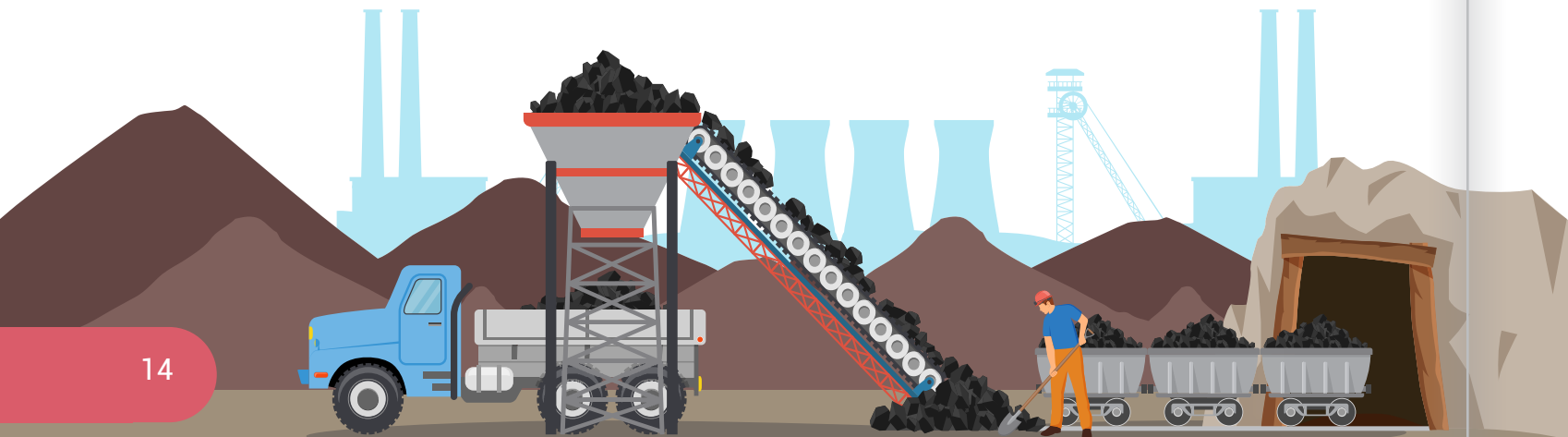


Degradasi lingkungan pesisir juga terjadi di Kabupaten Donggala yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya aktivitas pembangunan untuk pelabuhan, permukiman, serta pembukaan tambak di kawasan hutan bakau. Hal ini memperkuat hasil temuan dalam diskusi yang berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa tingginya tingkat degradasi lingkungan pesisir di Kabupaten Donggala disebabkan oleh pembangunan dermaga dan pelabuhan yang dilakukan oleh industri dengan menggunakan timbunan material hasil tambang. Salah satu dampak langsung dari aktivitas ini adalah terjadinya intrusi air laut ke wilayah permukiman pesisir, yang menyebabkan penyempitan zona intertidal² dan pada akhirnya membatasi aktivitas petani dan nelayan sekitar. Intrusi air laut tersebut juga mencemari sumber air tawar, sehingga menyebabkan sawah tidak dapat lagi dimanfaatkan secara maksimal, serta pasokan air bersih menjadi semakin terbatas.

² Zona intertidal atau zona pasang surut merupakan area tempat lautan bertemu dengan daratan antara pasang surut tinggi dan rendah. Zona ini terdapat dimana saja lautan bertemu dengan daratan, seperti tepian yang curam hingga pantai berpasir yang landai serta dataran lumpur yang dapat membentang hingga ratusan meter.



Perubahan mata pencaharian masyarakat tidak hanya diakibatkan oleh dampak perubahan iklim, namun juga akibat aktivitas pertambangan dan industri. Contohnya di Desa Tompira, Kabupaten Morowali Utara, perubahan pola cuaca yang tidak menentu telah memaksa sebagian masyarakat untuk beralih dari petani menjadi nelayan kerang meti. Namun setelah peralihan ini, masyarakat kembali menghadapi ancaman dari pesatnya pembangunan infrastruktur industri. Salah satu contohnya adalah adanya pembangunan jembatan yang telah mengubah arus sungai menjadi lebih deras, menyulitkan nelayan kerang meti dalam menggunakan perahu kecil dan menyebabkan hasil tangkapan kerang meti mereka menjadi lebih berpasir. **Meski masyarakat telah menunjukkan ketahanan terhadap perubahan mata pencaharian ini dengan membentuk kelompok usaha ekonomi perempuan dalam mengolah produk berbasis kerang meti, namun kualitas hasil tangkapan yang menurun mengharuskan mereka mengeluarkan biaya tambahan untuk membersihkan pasir dari kerang meti. Selain itu, aktivitas industri juga berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir, yang tidak hanya disebabkan oleh anomali cuaca, tetapi juga oleh perubahan tata ruang dan ekosistem akibat pembangunan industri.**



03. Peran dan Inisiatif Komunitas dalam Menjawab Krisis Iklim dan Lingkungan di Sulawesi Tengah

Komunitas masyarakat sipil di Sulawesi Tengah menunjukkan peran aktif dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat, baik dalam mendorong aksi iklim maupun merespons permasalahan yang berkaitan dengan industri dan pertambangan. **Terkait aksi iklim, kejadian gagal panen yang dialami oleh petani sawah dan kakao akibat banjir di Kecamatan Lore Selatan, Lore Barat, sebagian Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, dan Desa Meko telah berdampak langsung pada ketahanan pangan di masing-masing wilayah.** Sebagai respons, berbagai komunitas telah berbondong-bondong untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana, termasuk bencana akibat perubahan iklim, serta meningkatkan advokasi kebijakan terkait mitigasi dan adaptasi berbasis gender. Salah satu program yang telah diimplementasikan adalah *Anticipatory Humanitarian Action* (AHA) di Desa Meko, yang bertujuan untuk membangun ketangguhan masyarakat sejak dini. Pada tahun 2025, upaya ini akan dilanjutkan dan diperluas melalui program asuransi tani, pendampingan terhadap penguatan literasi keuangan, advokasi kebijakan penanggulangan bencana, serta penguatan kolaborasi di tingkat tapak. Demikian juga dengan pemberdayaan masyarakat setempat di Desa Bariri, Lore Tengah, melalui pendampingan kelompok petani kopi yang telah terbentuk dari tahun 2023. Pendampingan tersebut berfokus pada pengembangan usaha kopi sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, terdapat beberapa tantangan yang sedang dihadapi, meliputi stabilisasi harga, peningkatan strategi promosi dan perluasan pasar, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam kewirausahaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, komunitas masyarakat sipil bekerja sama dengan Dinas Pertanian terkait promosi dan pemasaran komoditas perkebunan dan hasil hutan bukan kayu. Selain itu, komunitas masyarakat sipil juga melakukan pendampingan melalui peningkatan kapasitas petani milenial, mendorong intervensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), serta melakukan identifikasi peluang pasar baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Beberapa komunitas masyarakat sipil di Sulawesi Tengah, seperti Yayasan Panorama Alam Lestari (YPAL), Relawan untuk Orang dan Alam (ROA), serta WALHI Sulawesi Tengah, juga **memberikan dukungan dalam upaya penguatan perhutanan sosial, termasuk mendorong perizinan dan legalisasi kawasan kelola masyarakat.** Pada tahun 2024, ketiga lembaga ini juga merencanakan evaluasi terhadap pelaksanaan perhutanan sosial di berbagai desa untuk menilai efektivitas dukungan. Selain itu, **untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, dukungan juga diberikan melalui pembentukan kelompok simpan pinjam yang didominasi oleh kelompok perempuan petani kakao.** Kelompok ini bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan para petani tersebut, terutama sebagai cadangan apabila harga kakao naik. Hingga tahun 2024, telah terbentuk 15 kelompok dengan nilai tabungan kolektif mencapai Rp 200 juta. Pengelolaan keuangan bersama ini juga memungkinkan para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Pendampingan untuk mendapatkan izin perhutanan sosial juga dilakukan oleh Yayasan Sikola Mombine sejak tahun 2017 di tujuh desa di Kabupaten Poso, Donggala, dan Tojo Una-Una, sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan pembukaan lahan untuk pertanian. Akan tetapi, dalam proses pendampingan tersebut, Yayasan Sikola Mombine masih menghadapi tantangan, khususnya dalam memastikan petani melakukan pencatatan hasil panen secara konsisten, terutama setelah mereka mendapatkan dukungan tambahan dalam pengelolaan tanaman dan produksi hasil panennya.

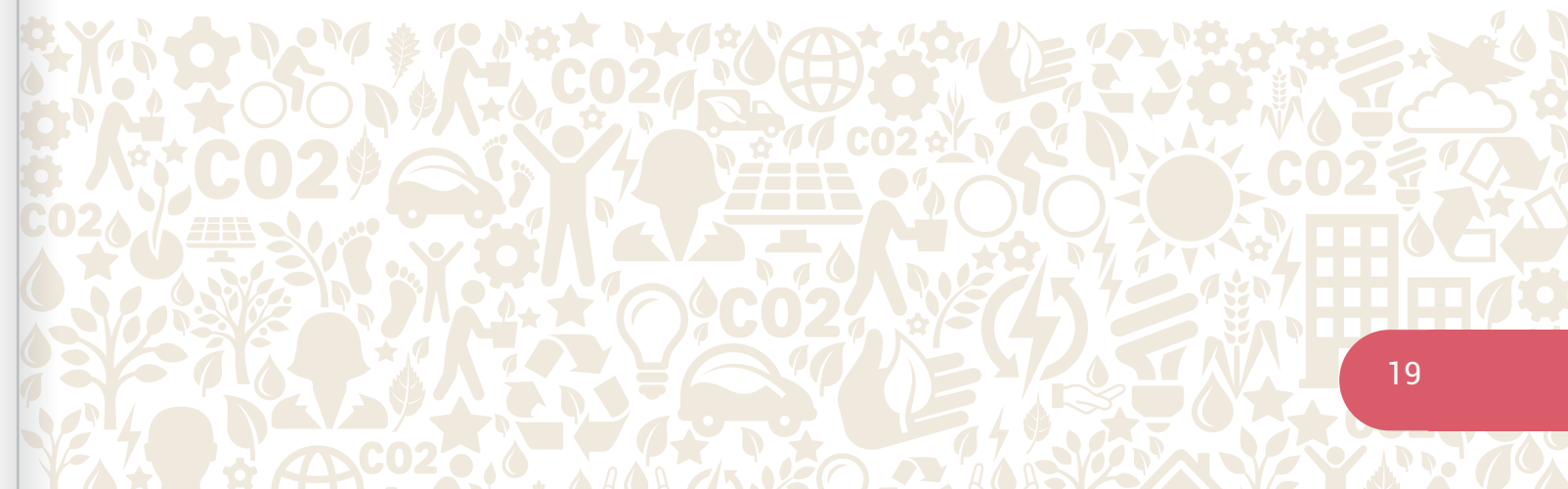


Upaya kolaborasi juga dilakukan antara Yayasan Sikola Mombine dengan Yayasan Pemerhati Lingkungan (YPL) untuk mendorong **pembentukan kelompok kerja (pokja) perhutanan sosial di tingkat kabupaten** sebagai bagian dari program inovasi Pemerintah Kabupaten Poso yang menjadikan perhutanan sosial sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh, Desa Malitu terkenal dengan komoditas unggulan gula arennya. Meskipun terdapat komoditas unggulan, perekonomian masyarakat di Desa Malitu tetap tidak meningkat. Dari masalah tersebut, kedua yayasan memberikan dukungan melalui **pendampingan untuk membentuk komunitas perhutanan sosial dan kelompok usaha, yang berperan menstabilkan harga gula dan mendorong pembentukan peraturan desa terkait pengelolaan hasil hutan**. Pada akhirnya, masyarakat dapat melihat peluang untuk mengembangkan kawasan khusus tanaman aren dan mendapatkan bantuan pendanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk budi daya gula aren hingga produksi mencapai 1,3 ton dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Selain itu, **kerja sama antar pemerintah terkait budi daya gula aren juga telah dibangun, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dengan Pemerintah Dubai pada tahun 2022 untuk mengembangkan budi daya gula aren menjadi produk bernilai tambah, yaitu gula semut**. Kerja sama seperti ini perlu dipertahankan agar peluang pasar tidak hanya terbatas pada skala nasional, namun juga diperluas hingga pasar global, sehingga memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.



Kemudian, pendampingan oleh LSM kepada masyarakat yang terdampak aktivitas industri dan pertambangan juga telah aktif dilakukan. Sejumlah organisasi seperti WALHI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) sedang melakukan advokasi terkait persoalan izin tambang batu gamping di Kabupaten Banggai Kepulauan. Di tengah maraknya ekspansi perkebunan sawit, Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) juga berperan dalam kegiatan pendampingan penghijauan melalui penanaman pohon durian dan rumput gajah, sebagai bagian dari upaya restorasi lahan. Selain itu, terdapat juga kerja sama antara Yayasan Komiu dengan Universitas Indonesia dalam melakukan penelitian terkait dampak pencemaran industri terhadap populasi kerang meti yang terancam punah. Penelitian ini penting untuk memastikan keberlangsungan ekosistem pesisir, karena jika kerang meti tercemar, maka masyarakat di Desa Tompira yang menggantungkan hidupnya pada komoditas kerang meti terancam kehilangan mata pencaharian dan harus beralih ke pekerjaan lain yang layak.

Permasalahan degradasi lahan dan kerusakan lingkungan yang sebagian besar terjadi di Morowali dan Morowali Utara akibat kegiatan industri ekstraktif, juga menjadi fokus perhatian beberapa LSM seperti Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA), Solidaritas Perempuan (SP), serta Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Beberapa aktivitas yang dilakukan di antaranya adalah melakukan riset terkait kebutuhan air bersih di Morowali Utara, membentuk Balai Kegiatan Belajar Masyarakat (BKBM) melalui kerja sama dengan pihak swasta, melakukan advokasi kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan terhadap akses sumber mata pencaharian yang layak, serta mendorong pemerintah daerah dan perusahaan industri untuk melakukan pemulihan lingkungan. **Upaya peningkatan ketahanan masyarakat sekitar juga dilakukan melalui pemberdayaan pengolahan produk lokal, seperti untuk komoditas merica, pala, dan durian yang berada di Desa Tanauge.**



Kemudian, dengan dukungan dari Pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Donggala, berbagai kegiatan telah dilakukan sebagai respons atas degradasi lingkungan yang terjadi di wilayah darat dan laut. Kegiatan tersebut meliputi **implementasi Program Kampung Iklim (Proklam) berbasis perhutanan sosial, perbaikan ekosistem hutan melalui penyusunan dan pengusulan Peraturan Desa (Perdes) tentang perbaikan di kawasan hutan, pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), serta pelatihan paralegal untuk memperkuat kapasitas hukum masyarakat di lingkaran tambang.** Bantuan dari pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah juga diberikan dalam hal permasalahan degradasi lingkungan. Dukungan diberikan terhadap komunitas lokal untuk melakukan aksi bersih-bersih di bantaran sungai sebagai respons terhadap pengelolaan sampah yang belum optimal. Permasalahan sampah yang menumpuk menjadi salah satu faktor yang memperparah degradasi lingkungan. Oleh karena itu, **perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mewujudkan komunitas yang mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian ekosistem yang menopang kehidupan mereka.**



04. Hasil Diskusi

Beberapa hasil diskusi terkait menyelaraskan aksi iklim daerah dengan target iklim Indonesia adalah sebagai berikut:



Pemberian perizinan khususnya untuk pembukaan tambang dan pembangunan kawasan industri, yang perlu mendapat kejelasan terkait kewenangan pusat dan daerah. Banyaknya tambang dan industri yang gencar dibangun di Sulawesi Tengah, tidak terlepas dari kelonggaran dalam pemberian izin serta minimnya pengawasan dan sanksi terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Contohnya, di Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, banyak ditemukan wilayah pertambangan yang beroperasi tanpa izin. Kemudian, di Kabupaten Donggala, moratorium³ tambang galian C⁴ yang telah diterbitkan tidak berjalan secara efektif karena tidak adanya pemantauan yang memadai. Bahkan, hasil tambang dari wilayah tersebut tetap digunakan untuk memasok kebutuhan di provinsi lain, yang menunjukkan adanya **ketimpangan dalam implementasi dan pengawasan kebijakan perizinan**. Permasalahan ini mencerminkan lemahnya regulasi dan ketidakseimbangan kewenangan, terutama terkait evaluasi terhadap pemberian izin galian C oleh pemerintah daerah. Sementara itu, untuk pertambangan galian A dan B, seperti batu bara dan mineral yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, **peran pemerintah daerah hanya terbatas pada fungsi pengawasan tanpa wewenang substantif untuk mengatur atau mengintervensi**. Situasi serupa juga terjadi dalam pembangunan kawasan industri, di mana sebagian besar kawasan industri di Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Perizinannya bersifat terpusat dan ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perizinan maupun pengawasan kegiatan industri menjadi sangat minim.

³ Moratorium tambang merupakan penghentian sementara penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Moratorium tambang biasanya digunakan untuk mengevaluasi atau mengkaji ulang kebijakan terkait pertambangan.
⁴ Bahan galian di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan: A, B, dan C. Golongan C mencakup bahan galian yang tidak termasuk golongan A (bahan galian strategis) dan golongan B (bahan galian vital). Bahan galian C yang paling banyak penambangannya adalah pasir, kerikil, batu kali, dan tanah urug.

Berkaca dari Perpres No. 98 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah hanya sebatas pada fungsi pengawasan, maka sistem **perizinan yang lebih jelas dan transparan sangat diperlukan, termasuk dengan melibatkan pemerintah daerah dan tidak hanya terpusat di tingkat nasional**. Pelibatan pemerintah daerah dalam proses perizinan dapat mengurangi potensi tumpang tindih lahan antara perusahaan dan masyarakat, yang selama ini sering memicu konflik dan ketidakpastian hukum. Dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang ekstraktif dan kawasan industri juga dapat diminimalisir apabila terdapat pembagian kewenangan yang adil, tegas, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan pertambangan dan industri. Ketegasan dalam kebijakan perizinan tidak hanya dibutuhkan untuk sektor pertambangan, namun juga pembangunan kawasan industri dan pembangkit listrik, agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak mengorbankan hak-hak serta penghidupan masyarakat lokal.





Pelibatan komunitas dan masyarakat lokal yang terdampak oleh perubahan iklim, deforestasi, serta industrialisasi, perlu didorong secara menyeluruh, mulai dari proses perumusan kebijakan hingga pada tahap implementasi. Program perhutanan sosial merupakan salah satu inisiatif Pemerintah yang mendorong aksi iklim sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya harus disertai dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, termasuk pemahaman terhadap potensi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, masyarakat di Kabupaten Donggala dan Morowali yang sebelumnya menanam durian, kakao, dan kopi, mulai beralih menanam sawit karena harga jual yang lebih tinggi dan metode budi dayanya dianggap lebih mudah serta lebih tahan terhadap perubahan iklim. Selain itu, kemudahan dalam mendapatkan bibit sawit turut mendorong peralihan massal ini. Akan tetapi, pembukaan lahan untuk sawit juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di mana pada saat musim kemarau air sungai mulai mengering⁵ dan pada saat musim hujan terjadi banjir karena perubahan arah aliran sungai yang semakin mendekati permukiman warga akibat konversi lahan menjadi perkebunan sawit. **Konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit (monokultur) menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi alami yang sebelumnya berperan menyerap air hujan dan menahan aliran permukaan.** Akibatnya, pada musim kemarau sungai lebih cepat mengering karena kemampuan lahan untuk menyimpan air tanah menurun. Begitu pula, **alih fungsi hutan dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir pada musim hujan, karena pohon sawit tidak mampu menahan air sebagaimana pohon hutan pada umumnya.**

⁵ Konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit (monokultur) menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi alami yang sebelumnya berperan menyerap air hujan dan menahan aliran permukaan. Akibatnya, pada musim kemarau sungai mengering, karena kemampuan lahan untuk menyimpan air tanah menurun.

Pemberian pemahaman terkait risiko lingkungan perlu diimbangi dengan pemberian solusi yang memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem. Intervensi pemerintah diperlukan dalam pengaturan harga jual komoditas dan pengembangan alternatif usaha selain komoditas sawit yang tahan terhadap perubahan iklim, namun ramah lingkungan. Contohnya, di Kabupaten Donggala, dukungan terhadap komunitas telah diberikan untuk meningkatkan ketergantungan ekonomi pada kawasan bakau. Tidak hanya berfungsi sebagai kawasan wisata, tanaman bakau juga dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai produk seperti kopi, teh, sirup, dan tepung sebagai bahan masakan. Namun, persoalan yang dihadapi adalah **keterbatasan akses terhadap pasar dan hambatan dalam perizinan produk-produk dari bakau.** Oleh karena itu, pendampingan dalam hal pengembangan strategi pemasaran yang dapat menjangkau pasar di luar Kabupaten Donggala sangat diperlukan guna memperluas jangkauan produk dan meningkatkan nilai ekonomi hasil olahan tanaman bakau.





Pemerintah telah menyalurkan berbagai bentuk pendanaan untuk mendukung aksi iklim dan pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dikelola oleh Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tengah. Dana sebesar Rp 300 juta telah disalurkan untuk mendukung tiga kelompok sasaran, yakni Rp 100 juta untuk kelompok perempuan, Rp 100 juta untuk kelompok pemuda, dan Rp 100 juta untuk kelompok nelayan dan petani. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi **pengalihan tujuan penggunaan dana akibat tekanan ekonomi yang dialami masyarakat, terutama karena kehilangan sumber daya alam yang sebelumnya menjadi sumber utama mata pencaharian**. Akibatnya, sebagian dana bantuan dialihkan untuk usaha makanan dan minuman kemasan yang dinilai lebih cepat memberikan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa **skema pendanaan, terutama yang bersumber dari pemerintah, perlu mempertimbangkan kondisi aktual dan proyeksi keberlangsungan hidup masyarakat**, sehingga tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi secara umum, tetapi juga terintegrasi dengan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tepat sasaran.

Contoh kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Donggala melalui program Pen Mangrove, yang melakukan penanaman bakau di 12 desa dengan dukungan anggaran yang cukup besar. Namun, permasalahan muncul ketika kegiatan penanaman dilakukan di area pantai yang secara ekologis tidak pernah menjadi habitat alami bakau, sehingga keberhasilan program menjadi dipertanyakan. **Evaluasi terhadap pelaksanaan program seperti ini sangat diperlukan agar pendanaan tidak hanya digunakan untuk implementasi aksi yang dianggap berkontribusi terhadap target iklim nasional saja, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya**. Keberhasilan program seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah anggaran yang terserap, melainkan juga dari seberapa jauh program tersebut mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, seperti pengolahan hasil tanaman bakau menjadi produk bernilai ekonomi yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.



Pendampingan dalam bentuk *re-skilling* dan *up-skilling* merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung masyarakat dan tenaga kerja yang mengalami peralihan mata pencaharian akibat dampak perubahan iklim maupun proses industrialisasi. Pendidikan sejak jenjang menengah memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sejak dini mengenai dampak perubahan iklim dan dalam melakukan aksi-aksi yang berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Memasukkan kurikulum atau mata pelajaran yang berkaitan dengan perubahan iklim dapat dipertimbangkan baik dari tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pemahaman yang sama bahkan dengan bermacam-macam latarbelakang keilmuan dan mampu mengembangkan potensi daerah untuk berkontribusi terhadap aksi iklim. Kemudian, pendampingan terhadap masyarakat yang terdampak secara langsung oleh perubahan iklim dan aktivitas industri juga menjadi kebutuhan mendesak. **Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan siklus perekonomian lokal apabila sumber daya yang menopang penghidupan masyarakat hilang. Dalam konteks ini, dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau lembaga lain harus dimanfaatkan untuk pengembangan produk lokal yang memiliki nilai tambah**. Sebagai contoh, apabila populasi kerang meti semakin menghilang, maka sumber daya alternatif seperti hasil pertanian lokal berupa sayuran dan buah-buahan yang masih ada dapat diolah menjadi produk yang dapat menopang perekonomian masyarakat setempat.



Deforestasi merupakan salah satu isu utama di Sulawesi Tengah. Deforestasi tidak hanya menghilangkan berbagai jenis tanaman, namun juga sangat berdampak terhadap habitat flora dan fauna. Salah satu bukti nyata dari dampak ini adalah semakin seringnya satwa liar menjauh dari habitat aslinya dan memasuki permukiman warga, yang menjadi tanda terganggunya keseimbangan ekologis akibat penggundulan hutan untuk pembukaan lahan. Oleh karena itu, diperlukan **penguatan sistem inventarisasi dan pemantauan keanekaragaman hayati – baik untuk flora maupun fauna – secara berkala sebagai langkah antisipatif terhadap ancaman deforestasi dan perubahan iklim.** Pemantauan yang dilakukan secara rutin terhadap kondisi keanekaragaman hayati dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai spesies apa saja yang terdampak dan seberapa besar risiko kepunahannya akibat perubahan lanskap hutan. Data ini sangat penting sebagai dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan konservasi dan restorasi yang berbasis bukti.









Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) adalah sebuah lembaga *think tank* di Indonesia yang berfokus pada upaya-upaya dekarbonisasi dan mendorong realisasi masyarakat berketangguhan iklim dan rendah karbon di Indonesia. Melalui analisis legal dan kebijakan, advokasi kebijakan serta peningkatan kapasitas, IRID menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku keahlian, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mencari rekomendasi dan solusi yang relevan dan dapat diwujudkan (*doable*) demi mendukung pembuatan kebijakan yang efektif.

 <https://irid.or.id>

Tetap terhubung dengan kami di:

  Indonesia Research Institute for Decarbonization
  Irid_ind